



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1948
TENTANG

MEMPERPANJANG WAKTU PERATURAN D.P.N.
NO. 5, 7, JO. 31, 8 JO. 34, 9 JO. 34, 11 DAN 16.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16 bersandar atas pasal 11 ayat 1 Undang-undang keadaan bahaya (Undang-undang No. 6 tahun 1946) jo. Undang-undang No. 1, No. 15, No. 31, No. 37 tahun 1947, No. 6 dan No. 18 tahun 1948 yang berlaku sampai tanggal 11 Juli 1948 masih dibutuhkan, sehingga waktu berlakunya perlu diperpanjang lagi;
- Mengingat : pasal 11 ayat 2 Undang-undang keadaan bahaya tahun 1946 pasal 5 ayat 1 pasal 20 ayat 1 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA
PERATURAN-PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34,
11 dan 16.

Pasal 1.

Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara :

- No. 5 tentang pejabatan pos, Telegrap dan Telepon dalam keadaan bahaya;
 - No. 7 jo. No. 31 tentang penilikan Pos, Telegrap dan Telepon;
 - No. 8 jo. No. 34 tentang pesawat penerimaan Radio;
 - No. 9 jo. No. 34 tentang pemancar Radio;
 - No. 11 tentang pencetakan, pengumuman dan penerbitan;
 - No. 16 tentang pembikinan, pemeriksaan dan peredaran pilem;
- diperpanjang waktu berlakunya sampai tanggal 11 Oktober 1948.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 1948.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Agustus 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Pertahanan A.I.

MOHAMMAD HATTA.

Diumumkan
pada tanggal 13 Agustus 1948.
Wakil Sekretaris Negara,

RATMOKO.